

Judul : Polemik berkurangnya kuota haji, DPR: Kemenhaj, pelunasan biaya haji 2026 sudah dekat
Tanggal : Sabtu, 22 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Polemik Berkurangnya Kuota Haji

DPR: Kemenhaj, Pelunasan Biaya Haji 2026 Sudah Dekat

Anggota Komisi VIII DPR Aprozi Alam mendesak Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) segera menerbitkan keputusan resmi (Kepmenhaj) soal penyeragaman masa tunggu haji di seluruh provinsi di Indonesia menjadi 26 tahun.

LANDASAN hukum itu bertujuan mengakhiri polemik kuota haji yang mulai muncul di berbagai daerah. Utamanya Provinsi Jawa Barat (Jabar) karena kuota haji 2026 berkurang drastis. "Setelah Kepmenhaj terbit, Kemenhaj bisa langsung melakukan sosialisasi ke masyarakat atas adanya pengurangan kuota haji 2026," saran Aprozi dalam keterangannya, Jumat (21/11/2025).

Sosialisasi tersebut sangat diperlukan untuk mengakhiri polemik. Apalagi beberapa bupati di Jabar sudah menyampaikan keberatan atas berkurangnya kuota haji secara drastis. "Kepmenhaj harus terbit di November ini karena akhir bulan sudah mulai masa pelunasan biaya haji 2026," desak anggota Fraksi Golkar ini.

Bila memang Kepmenhaj tidak jadi terbit dalam waktu dekat, Aprozi menyarankan, Kemenhaj melakukan sosialisasi ke masyarakat atas penundaan penya-

marataan kuota haji pada tahun 2026. Sehingga, masyarakat tidak resah karena kebijakan baru tersebut dijalankan tahun 2027. "Sosialisasi ini akan membuat masyarakat tenang," kata dia.

Menurutnya, berdasarkan amanat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, ada beberapa hal yang harus dituntaskan dalam waktu dekat. Hal ini sebagai konsekuensi atas berpindahnya penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Kemenhaj.

Pertama, strukturisasi pegawai Kemenhaj di tingkat pusat dan daerah. Tujuannya, agar para pegawai bisa bekerja secara maksimal menerima pelunasan haji dan melakukan seleksi petugas haji untuk kelancaran ibadah haji tahun 2026.

Kedua, lanjut dia, proses peralihan aset dari Kemenag ke Kemenhaj. Khususnya terkait aset



Aprozi Alam

untuk penyelenggaraan ibadah haji. "Ini bisa dilakukan sembari menyiapkan pelaksanaan haji 2026" kata dia.

Ketiga, dia menyarankan Kemenhaj segera melakukan komunikasi secara intensif dengan Kemenhaj Kerajaan Arab Saudi, utamanya untuk persiapan jemaah haji Indonesia selama berada di Tanah Suci. "Kita tidak mau peristiwa yang tidak baik pada tahun sebelumnya kembali terulang pada tahun 2026," harap legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung ini.

Terakhir, Aprozi berharap pelaksanaan haji tahun 2026 akan lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

Terlebih, mulai tahun ini penyelenggara haji di bawah koordinasi lembaga baru yaitu Kemenhaj.

Senada, anggota Komisi VIII DPR Lisdha Hendrajoni mengingatkan Kemenhaj agar tidak tergesa-gesa menerapkan skema baru pembagian kuota haji. Sebab, skema baru berpotensi menimbulkan kegaduhan dan merugikan banyak provinsi.

Lisdha meminta kebijakan sementara dengan tetap mengikuti pola penentuan kuota haji sebelumnya. Ini dilakukan sambil menunggu kepastian dari Kerajaan Arab Saudi terkait kemungkinan penghapusan batas kuota.

"Jangan kita mencari-cari masalah yang selama ini tidak jadi masalah. Lebih baik kita fokus pada persoalan nyata penyelenggaraan haji 2026," tegas Lisdha dalam keterangannya, Jumat (21/11/2025).

Berdasarkan hitungannya, Lisdha menyebut ada sekitar 20 provinsi akan dirugikan jika skema baru diberlakukan, termasuk Sumatera Barat (Sumbar). Bahkan, provinsi yang dianggap diuntungkan pun belum tentu siap berangkat lebih cepat. "Ini pasti akan menimbulkan kegaduhan," kata dia.

Lisdha mengungkapkan informasi

terbaru dari Arab Saudi, ada kemungkinan penghapusan pembatasan kuota haji untuk Indonesia. Karena itu, kebijakan pembagian kuota tidak diubah terlebih dahulu. "Kalau kuota dihilangkan, jemaah justru bisa berangkat lebih cepat seperti yang kita harapkan," imbuh anggota Fraksi NasDem ini.

Selain itu, Lisdha menyinggung isu penjualan kuota haji yang dinilai mencoreng penyelenggaraan haji. Hal ini sangat menyedihkan dan diharapkan praktik ini tidak pernah terjadi lagi ke depannya. "Transparansi itu krusial untuk membangun kepercayaan publik, apalagi kementerian baru," tegasnya.

Sementara, Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak memastikan, perubahan skema kuota haji akan diterapkan pada penyelenggaraan ibadah haji 2026. Sebab kuota haji merupakan hak yang harus secepatnya diberikan kepada yang berhak mendapatkannya.

"Jadi, tidak ditunda. Kalau toh kami undur, artinya orang yang paksa supaya diundur dia mau enaknya di dia, tapi enggak enak di orang," kata Dahnil dilansir melalui kanal Youtube miliknya 'DAS Official' pada Kamis (20/11/2025). ■ TIF